



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Konsep Dan Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Sistem Filsafat, Dan Sistem Etika

Adila Rizkika¹, Haulya Razkianita², Sabita Tarinda³, Najwa Hilda Salsabila⁴, Adelia Saumi Kamada⁵

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, adilarizkika@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, haulya.razkianita@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, sabitarinda@gmail.com

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, najwahilda@gmail.com

⁵Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, adeliasaumi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, sistem filsafat, dan sistem etika yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila akibat pengaruh globalisasi, sekularisme, dan hedonisme yang menggeser karakter bangsa dari nilai luhur ke arah individualistik dan materialistik. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*narrative literature review*) dengan menelusuri berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang diterbitkan. Sumber-sumber yang dikaji dipilih berdasarkan relevansinya terhadap pembahasan Pancasila sebagai ideologi, filsafat, dan sistem etika bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki fungsi fundamental sebagai ideologi pemersatu bangsa, arah perjuangan nasional, serta pedoman moral dan pembangunan yang menyeimbangkan nilai spiritual, sosial, dan material. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memuat dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berakar pada refleksi budaya bangsa Indonesia, sehingga bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara sebagai sistem etika, Pancasila menjadi sumber moralitas dan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial, politik, dan profesional. Secara keseluruhan, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan publik, dan budaya digital menjadi sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa serta menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan arah ideologis dan karakter nasional.

Kata Kunci: Pancasila; Ideologi Negara; Sistem Filsafat; Sistem Etika; Globalisasi.

*Correspondence Address: adilarizkika@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	12 November	-	30 September 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam membangun karakter dan arah moral bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi sumber nilai dan pandangan hidup yang memadukan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi

bagian integral dari pembentukan karakter siswa, terutama dalam pengembangan sikap religius, toleransi, dan tanggung jawab sosial (Khoiriah *et al.*, 2023). Secara etis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar kenegaraan, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam menumbuhkan perilaku yang beradab dan berkeadilan di tengah arus globalisasi yang sarat dengan relativisme nilai (Alqadri *et al.*, 2021). Oleh karena itu, urgensi Pancasila terletak pada kemampuannya sebagai sistem etika yang memandu manusia Indonesia untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip moral universal namun berakar pada budaya nasional. Dengan demikian, revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga keutuhan ideologi bangsa di tengah perubahan sosial dan tantangan modernitas (Fauzan *et al.*, 2019).

Dari sudut pandang filsafat, Pancasila mencerminkan sistem berpikir yang bersifat ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang menjadikan manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat dan berkeadilan (Windari & Aziz, 2022). Filsafat Pancasila mengandung prinsip keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara spiritualitas dan materialitas, serta antara kebebasan dan tanggung jawab moral (Tsaqifahukama *et al.*, 2023). Sebagai sistem etika, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar etis bagi perilaku warga negara, dengan menekankan nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai norma kehidupan bersama (Kamaria Ulpah *et al.*, 2023; Nurassyifa & Dewi, 2022).

Kajian mengenai konsep dan urgensi Pancasila perlu diperkuat karena bangsa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa terkikisnya nilai-nilai luhur akibat arus globalisasi dan pengaruh budaya asing. Nilai-nilai fundamental seperti gotong royong, sopan santun, dan solidaritas sosial mulai mengalami kemunduran, sementara sebagian generasi muda lebih tertarik meniru gaya hidup dari luar negeri. Fenomena ini berimplikasi pada menurunnya moralitas bangsa yang tercermin melalui berbagai perilaku menyimpang, seperti kekerasan dan maraknya penyebaran berita bohong di masyarakat (Yohamintin & Widiensyah, 2024).

Dalam konteks tersebut, penguatan kajian Pancasila menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan eksistensinya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa dampak terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Tidak sedikit kebijakan yang dirumuskan tanpa sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sehingga posisi Pancasila sebagai dasar filosofis negara berpotensi tergerus oleh dinamika zaman (Harahap, Dewi, & Saragi, 2023).

Pancasila memiliki peranan ganda, yaitu sebagai dasar negara sekaligus sistem etika yang menjadi sumber nilai moral dalam kehidupan berbangsa. Sebagai sistem etika, Pancasila berfungsi menuntun perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggara negara agar senantiasa berpijak pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan harmoni, menumbuhkan toleransi, serta memperkuat persatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia (Syajaro *et al.*, 2024).

Dari sudut pandang sosial dan akademik, penguatan kajian terhadap Pancasila juga sangat diperlukan karena berperan sebagai landasan moral bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai fondasi yang mampu mengarahkan bangsa menghadapi berbagai tantangan modern seperti perubahan nilai, konflik sosial, korupsi, dan pengaruh teknologi informasi yang berpotensi melemahkan etika publik. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang konsisten, karakter dan identitas bangsa dapat terus terjaga di tengah derasnya arus globalisasi (Syajaro *et al.*, 2024).

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review*, yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik yang dikaji. Metode ini berfokus pada penyusunan tinjauan komprehensif mengenai perkembangan pengetahuan dan temuan ilmiah yang telah ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperbarui, membandingkan, serta menafsirkan ulang hasil penelitian sebelumnya dalam konteks yang lebih aktual. Pemilihan metode ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi pola temuan, menemukan celah penelitian yang belum dieksplorasi, dan menegaskan kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, penggunaan *narrative literature review* juga membantu menghindari duplikasi penelitian dan memberikan arah bagi pengembangan penelitian selanjutnya (Ferrari, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

a. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ideologi Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat kaku tetapi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Dewantara, Suhendar, Rosyid, dan Atmaja (2019) menjelaskan bahwa Pancasila menjadi kerangka filosofis utama dalam pendidikan kewarganegaraan karena mengandung nilai universal seperti religiositas, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini ditegaskan pula oleh Harianja & Sinaga (2025) yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni antara nilai spiritual, moral, dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial melalui semangat gotong royong dan musyawarah.

Berbeda dengan itu, liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama kehidupan sosial dan politik. Menurut Girvetz dan Dagger (2025) dalam *Encyclopaedia Britannica*, liberalisme berfokus pada perlindungan dan perluasan kebebasan individu terhadap intervensi negara yang berlebihan. Devi (2021) menambahkan bahwa liberalisme berakar pada konsep hak asasi manusia, rasionalitas individu, serta sistem ekonomi pasar bebas. Ideologi ini menjunjung tinggi sekularisme, di mana agama dipisahkan dari urusan negara dan dianggap sebagai pilihan pribadi. Meskipun demikian, liberalisme sering kali dikritik karena menimbulkan individualisme ekstrem dan kesenjangan sosial akibat kompetisi bebas di bidang ekonomi.

Sementara itu, komunisme memiliki karakteristik yang berlawanan dengan liberalisme. Brown (2013) mendefinisikan komunisme sebagai sistem ideologis yang menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mengedepankan kepemilikan kolektif oleh negara. Komunisme bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui perjuangan kelas pekerja melawan kaum kapitalis. Sistem ini juga ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan partai tunggal, ekonomi terencana, serta pandangan materialisme historis. Menurut Brown (2013), komunisme memiliki enam ciri utama, yaitu monopoli partai komunis, sentralisasi demokratis, kepemilikan negara atas alat produksi, ekonomi terencana, solidaritas internasional, dan aspirasi menuju masyarakat tanpa negara.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bersifat moderat dan inklusif. Berbeda dengan liberalisme yang sangat menonjolkan kebebasan individu dan pasar bebas, serta komunisme yang menekankan

kepemilikan kolektif dan kontrol negara penuh, Pancasila berusaha menyeimbangkan keduanya. Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan sebagai dasar moral, menjunjung kemanusiaan, mengedepankan persatuan nasional, menegakkan demokrasi melalui musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dewantara *et al.*, 2019; Harianja & Sinaga, 2025).

1. Nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis dalam ideologi Pancasila

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila mengandung tiga tingkatan nilai utama yang saling berkaitan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar memiliki sifat tetap dan abadi karena menjadi fondasi filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini tercermin dalam lima sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan ideologis yang membentuk karakter kebangsaan sekaligus menjadi arah bagi pembangunan nasional (Rahmawati, 2025; Annabilah, 2024).

Nilai instrumental merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai dasar Pancasila yang diterapkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan, dan sistem kelembagaan negara. Melalui nilai ini, prinsip-prinsip fundamental Pancasila diimplementasikan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penerapan nilai instrumental tercermin dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik yang disusun berdasarkan semangat Pancasila untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi martabat manusia (Inthaly & Almubaroq, 2022; Essla *et al.*, 2023).

Adapun nilai praksis merupakan wujud konkret dari nilai dasar dan nilai instrumental yang diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tercermin melalui tindakan nyata masyarakat, seperti menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, mengutamakan gotong royong, menaati hukum, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Nilai praksis bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan akar filosofisnya sebagai jati diri bangsa Indonesia (Annabilah, 2024; Sianturi & Dewi, 2021).

Ketiga tingkatan nilai ini, membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi secara hirarkis dan fungsional. Nilai dasar berfungsi sebagai pijakan filosofis, nilai instrumental menjadi sarana implementasi, dan nilai praksis menjadi manifestasi nyata dalam perilaku sosial masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ketiga tingkatan nilai tersebut secara menyeluruh, Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai hidup yang membentuk karakter bangsa dan memperkuat keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara (Rahmawati, 2025; Essla *et al.*, 2023).

2. Fungsi ideologi Pancasila

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi sentral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Melalui sila “Persatuan Indonesia,” Pancasila memfasilitasi terciptanya kohesi sosial dan solidaritas nasional, sehingga perbedaan bukan menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk memperkuat identitas kebangsaan (Hakim, 2022). Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai arah

perjuangan bangsa, karena nilai-nilainya memberikan orientasi ideologis bagi seluruh kebijakan dan tindakan kolektif dalam mencapai tujuan nasional. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, misalnya, menjadi pedoman moral dan politik dalam menegakkan kesejahteraan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara senantiasa berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi yang berjiwa gotong royong (Budiman, 2024).

Pancasila berfungsi sebagai pedoman pembangunan nasional yang mengarahkan proses pembangunan agar tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan publik, sistem pendidikan, dan program pembangunan agar seluruh upaya tersebut tetap berlandaskan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, diharapkan arah kebijakan nasional dapat berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, mengedepankan inovasi, serta memperkuat karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi (Bovandra & Riewanto, 2024). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga berfungsi nyata sebagai pemersatu bangsa, arah perjuangan kolektif, dan pedoman normatif pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkeadaban.

b. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

a. Pancasila sebagai hasil pemikiran reflektif bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai hasil pemikiran reflektif berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan hasil dari proses perenungan yang mendalam atas perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut tidak datang dari luar atau meniru ideologi bangsa lain, tetapi lahir dari hasil pemikiran kritis dan kesadaran kolektif para pendiri bangsa terhadap kondisi sosial, budaya, serta sejarah masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila mencerminkan hasil refleksi bangsa terhadap pengalaman hidupnya sendiri untuk merumuskan dasar dan arah kehidupan berbangsa yang sesuai dengan jati diri Indonesia (Zhafira *et al.*, 2024). Sebagai pemikiran reflektif, Pancasila menjadi landasan etika dan moral dalam menghadapi tantangan sosial, seperti penyebaran hoaks di era digital (Setiyawan *et al.*, 2022).

Selain itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dimensi reflektif yang kuat, karena mengandung nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang lahir dari kesadaran budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar bernegara, tetapi juga menjadi pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat. Refleksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila menjadikannya ideologi terbuka yang selalu relevan di setiap zaman (Mawaddah, 2023). Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai pemikiran reflektif berarti menempatkannya bukan sekadar sebagai rumusan normatif, melainkan sebagai kesadaran filosofis yang terus hidup dan berkembang dalam dinamika bangsa Indonesia.

b. Unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Pancasila

Secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi jasmani dan rohani serta hidup dalam hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan alam. Hakikat keberadaan manusia dan realitas dalam Pancasila bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa

sebagai causa prima, yang menjadi dasar bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Ramdhani, 2018; Dewi, 2021).

Dari sisi epistemologis, Pancasila menjadi sumber pengetahuan yang mengintegrasikan rasio, pengalaman empiris, dan nilai moral-spiritual. Pengetahuan yang benar menurut Pancasila tidak hanya didasarkan pada logika, tetapi juga pada kebijaksanaan dan etika sosial demi kemanusiaan (Luthfiyah & Lhobir, 2023). Sedangkan secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik yang berpihak pada kemanusiaan (Zulfahmi & Aprison, 2022).

c. Pancasila sebagai filsafat terbuka

Pancasila sebagai filsafat terbuka menunjukkan bahwa ideologi ini tidak bersifat kaku atau dogmatis, melainkan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tanpa kehilangan nilai dasarnya. Menurut Dewantara, Suhendar, Rosyid, dan Atmaja (2019), Pancasila memiliki nilai-nilai universal seperti religiositas, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadikannya relevan untuk diimplementasikan dalam berbagai konteks zaman. Pandangan ini diperkuat oleh Harianja dan Sinaga (2025) yang menyatakan bahwa Pancasila berperan sebagai ideologi yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan global, karena nilai-nilainya bersumber dari kebijaksanaan budaya bangsa Indonesia yang bersifat fleksibel. Dengan demikian, perubahan kebijakan dan sistem kenegaraan di Indonesia dapat berkembang tanpa meninggalkan prinsip dasar Pancasila.

Selain itu, Pancasila sebagai filsafat terbuka mengandung dua dimensi utama, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar (seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial) bersifat tetap dan menjadi fondasi moral bangsa, sedangkan nilai instrumental dapat diubah sesuai kebutuhan zaman dan tantangan masyarakat (Kaelan, 2017). Hal ini menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai ideologi normatif, tetapi juga praktis—sebuah pedoman yang dapat diinterpretasikan ulang secara kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh Latif (2018), fleksibilitas Pancasila memungkinkan ideologi ini untuk tetap relevan dalam menghadapi modernisasi, globalisasi, dan perkembangan demokrasi tanpa kehilangan identitas keindonesiaannya.

Dengan sifatnya yang terbuka dan adaptif, Pancasila menjadi landasan yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas. Ia tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mengarahkan perkembangan tersebut agar tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai filsafat hidup yang progresif, karena dapat berkembang sejalan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansinya sebagai jati diri bangsa Indonesia (Kaelan, 2017; Latif, 2018).

c. Pancasila sebagai Sistem Etika

1) Pancasila sebagai sumber moral bangsa

Pancasila berfungsi sebagai sumber moral yang menuntun perilaku dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila tidak hanya menjadi landasan politik dan hukum, tetapi juga pedoman etis yang membentuk karakter dan identitas nasional. Nilai-nilai moral yang terkandung

dalam setiap sila mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan masyarakat (Maulida *et al.*, 2025).

Dalam konteks pendidikan, Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter bangsa yang berakhlak, adil, dan beradab. Melalui pendidikan berbasis nilai Pancasila, terutama dalam mata pelajaran PPKn, peserta didik diarahkan untuk menumbuhkan sikap toleransi, kejujuran, gotong royong, dan rasa tanggung jawab sosial (Sari, 2021). Pancasila dengan demikian berperan menanamkan nilai moral universal yang relevan dengan kehidupan modern.

Namun, tantangan globalisasi dan pengaruh budaya luar menyebabkan melemahnya internalisasi nilai Pancasila di masyarakat. Fenomena seperti individualisme, intoleransi, dan degradasi moral menunjukkan perlunya penguatan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral bangsa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang konsisten serta keteladanan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (Maulida *et al.*, 2025).

2) Nilai-nilai Etis dalam tiap Sila Pancasila

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang menjadi pedoman moral dan dasar filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan nilai etika ketuhanan yang menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sumber moralitas dan spiritualitas. Nilai ini mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama serta toleransi antarumat beragama sebagai cerminan keimanan yang beradab (Atqiyah *et al.*, 2024). Selanjutnya, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai etis penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan hak, dan kewajiban moral untuk memperlakukan sesama secara adil. Dalam konteks sosial, sila ini mendorong praktik solidaritas, empati, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar kehidupan berkeadaban (Pernando *et al.*, 2024).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai etika kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nilai ini mengajarkan bahwa tindakan etis adalah yang memperkuat harmoni sosial dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu. Penelitian Lintang & Najicha (2023) menegaskan bahwa nilai-nilai sila ketiga berfungsi sebagai perekat moral yang menjaga kohesi sosial bangsa di tengah perbedaan budaya dan agama. Selanjutnya, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mencerminkan etika demokrasi deliberatif yang menempatkan musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi sebagai prinsip utama pengambilan keputusan. Nilai ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus diambil dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral, bukan semata berdasarkan kekuasaan atau mayoritas (Atqiyah *et al.*, 2024).

Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai etis pemerataan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan kolektif. Sila ini menjadi landasan moral dalam membangun sistem sosial yang berkeadilan, di mana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tetapi dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernando *et al.* (2024) menjelaskan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan mendorong keadilan distributif. Dengan demikian, kelima sila Pancasila membentuk suatu sistem etika yang utuh dan hierarkis, yang mengarahkan perilaku individu maupun institusi agar selaras dengan nilai-

nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

3) Penerapan etika Pancasila dalam Kehidupan Sosial, Politik, dan Profesional

Pancasila sebagai sistem etika menegaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral yang menjadi dasar perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan sosial, politik, dan profesional. Dalam ranah sosial, etika Pancasila hadir sebagai sistem nilai yang menuntun perilaku individu dan komunitas agar selaras dengan cita-cita bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi perwujudan nyata dari sila kedua dan kelima. Nilai-nilai tersebut membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika mencerminkan integrasi antara moralitas individu dan kepentingan sosial yang lebih luas (Priwardani *et al.*, 2023).

Dalam ranah politik, nilai-nilai Pancasila memegang peran sebagai norma pengikat warga negara yang harus tunduk dan mematuhi dan sekaligus sebagai pandangan hidup yang mengatur kehidupan bernegara. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kekuasaan dijalankan berdasarkan nilai moral, bukan semata ambisi kekuasaan. Ketika politik dijalankan dengan etika Pancasila, maka korupsi, praktik nepotisme, atau politik identitas yang memecah bisa ditekan karena adanya tuntutan nilai keadilan, kemanusiaan dan persatuan.

Dalam ranah profesional, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk etika profesi di lingkungan akademik, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bagi sivitas akademika dalam bersikap dan bertindak. Penerapan Pancasila tercermin dalam kejujuran ilmiah, kedisiplinan, serta sikap saling menghormati antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar untuk menciptakan suasana akademik yang sehat, berintegritas, dan menjunjung tinggi martabat manusia (Simamora, 2022).

4) Relevansi Pancasila terhadap krisis moral dan degradasi karakter bangsa

Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi krisis moral dan degradasi karakter bangsa di era modern. Dalam konteks pendidikan dan sosial, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dan moral untuk membentuk kepribadian yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa nasionalis. Menurut Anugrah dan Rahmat (2024), penerapan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mampu memperkuat karakter peserta didik agar memiliki empati, tanggung jawab sosial, dan semangat gotong royong di tengah tantangan globalisasi dan arus budaya asing. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial dalam Pancasila terbukti efektif dalam membangun kesadaran moral generasi muda yang mulai melemah akibat perkembangan teknologi dan individualisme.

Sementara itu, degradasi moral di kalangan generasi milenial dipengaruhi oleh faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (lingkungan sosial dan media). Pancasila berperan sebagai panduan etis yang menuntun masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Hunaina *et al.* 2024). Dalam perspektif pendidikan karakter, integrasi nilai Pancasila dapat membentuk moralitas yang

kuat serta menghindarkan generasi muda dari perilaku menyimpang seperti intoleransi, hedonisme, dan apatisme (Anugrah & Rahmat, 2024; Faiz & Kurniawaty, 2022). Dengan demikian, Pancasila relevan sebagai solusi konseptual dan praktis untuk mengatasi krisis moral dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

d. Tantangan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi

1) Tantangan globalisasi, sekularisme, dan hedonisme

Penerapan Pancasila di era global memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai pedoman moral, sosial, dan politik bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis. Pancasila berfungsi sebagai filter ideologis yang menjaga identitas dan kepribadian bangsa di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang sering kali membawa nilai-nilai individualistik dan materialistik. Menurut Latif (2018), Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai philosophical way of life yang menuntun bangsa agar tetap berpegang pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan di tengah transformasi global. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan moral untuk memperkuat karakter nasional, meneguhkan nasionalisme, serta mencegah disorientasi nilai akibat penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa (Kaelan, 2017).

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga memiliki urgensi sebagai pondasi karakter bangsa (nation and character building) di tengah tantangan global. Dewantara, Suhendar, Rosyid, dan Atmaja (2019) menegaskan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Namun demikian, penerapan Pancasila tidak terlepas dari berbagai tantangan globalisasi, sekularisme, dan hedonisme. Globalisasi membawa dampak ganda: di satu sisi mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan rasa nasionalisme dan solidaritas sosial. Arus liberalisme global sering menonjolkan kebebasan individu di atas kepentingan bersama, bertentangan dengan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Kaelan, 2017).

Selain itu, sekularisme yang berkembang di era modern menantang dimensi spiritual Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Harianja dan Sinaga (2025), sekularisme yang berlebihan dapat melahirkan krisis etika dan moralitas sosial karena berupaya memisahkan nilai-nilai keagamaan dari kehidupan publik. Dalam hal ini, Pancasila hadir sebagai ideologi yang menjembatani antara spiritualitas dan rasionalitas, mengakui peran agama sebagai sumber moralitas tanpa menjadikan negara bersifat teokratis.

Sementara itu, hedonisme menjadi tantangan serius yang melemahkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial. Budaya konsumtif dan pencarian kesenangan instan yang dipengaruhi media dan teknologi global seringkali menurunkan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral masyarakat. Dewantara *et al.* (2019) menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai Pancasila untuk membentuk kepribadian moderat dan menolak gaya hidup yang hanya berorientasi pada kenikmatan pribadi.

Dengan demikian, di tengah arus globalisasi, sekularisme, dan hedonisme, urgensi penerapan Pancasila menjadi semakin nyata. Pancasila harus terus diaktualisasikan secara kontekstual dalam setiap aspek kehidupan politik, ekonomi,

budaya, dan pendidikan agar mampu menjadi pedoman yang hidup, relevan, dan solutif. Sebagaimana ditegaskan oleh Latif (2018), hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber etika publik dan orientasi pembangunan, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan arah ideologis dan identitas nasionalnya.

2) Pancasila sebagai filter nilai dan pedoman pembangunan karakter bangsa

a) Pancasila sebagai Filter Nilai dan Pedoman Pembangunan Karakter Bangsa

Pancasila memiliki peran sentral sebagai ideologi bangsa yang berfungsi ganda, yakni sebagai filter nilai terhadap pengaruh global dan pedoman pembangunan karakter bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menuntun bangsa Indonesia untuk berpikir dan bertindak sesuai jati diri serta nilai-nilai luhur kebangsaan (Ashifa & Dewi, 2021; Damanhuri, Hardika, Alwan, & Rahman, 2016). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi moral yang membentengi masyarakat dari pengaruh budaya luar sekaligus mengarahkan pembangunan karakter nasional yang berkelanjutan (Fitra Amalia & Najicha, 2023).

b) Pancasila sebagai Filter Nilai di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Dalam era globalisasi dan arus informasi yang terbuka, Pancasila berperan penting sebagai filter nilai sosial dan budaya. Melalui prinsip-prinsip dasarnya, Pancasila mampu menyaring pengaruh negatif dari luar yang berpotensi mengikis identitas bangsa (Ashifa & Dewi, 2021). Nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi batas moral terhadap masuknya individualisme, materialisme, dan gaya hidup hedonistik (Fitra Amalia & Najicha, 2023). Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila juga memberikan ruang untuk menerima unsur positif dari budaya luar tanpa menghilangkan ciri khas nasional, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kepribadian bangsa (Handitya, 2021; Naibaho, 2025).

c) Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Karakter Bangsa

Selain berfungsi sebagai filter, Pancasila juga menjadi pedoman utama pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilainya menjadi dasar pendidikan moral dan sosial dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertanggung jawab, dan berintegritas (Handitya, 2021). Pembangunan karakter ini diarahkan untuk mewujudkan *good citizen*, warga negara yang berjiwa nasionalis, demokratis, dan menjunjung tinggi kemanusiaan (Damanhuri *et al.*, 2016). Dalam konteks pendidikan, pemerintah menempatkan pembangunan karakter berbasis Pancasila sebagai prioritas strategis untuk memperkuat moralitas bangsa (Ashifa & Dewi, 2021). Lima nilai utama yang perlu diinternalisasi meliputi keagamaan, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas (Handitya, 2021). Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk kepribadian individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan budaya di tengah derasnya pengaruh global (Naibaho, 2025).

3) Strategi penguatan internalisasi nilai Pancasila

Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu pendidikan, kebijakan publik, dan budaya digital. Dalam bidang pendidikan, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan melalui pembelajaran kontekstual, pembiasaan, dan keteladanan untuk membentuk karakter pelajar yang beriman, berakhlak, dan berwawasan kebangsaan.

Ikromah, Jamaludin, & Damanhuri (2023) menegaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis nilai gotong royong dan musyawarah efektif menumbuhkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Pada ranah kebijakan publik, internalisasi nilai Pancasila diwujudkan melalui regulasi yang berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya berlandaskan etika kebangsaan (Putri *et al.*, 2023). Sementara itu, pada era budaya digital, penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pemanfaatan media daring sebagai sarana edukasi dan kampanye moral kebangsaan. Permatasari, Hanita, & Purwanto (2023) menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dengan konten kreatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan, kebijakan publik, dan budaya digital menjadi kunci dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilainya yang bersumber dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadikan Pancasila berbeda dari ideologi lain karena menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama. Sebagai sistem filsafat, Pancasila lahir dari pemikiran reflektif bangsa dan memiliki dimensi ontologis, epistemologis, serta aksiologis yang menuntun manusia Indonesia untuk hidup bermoral, adil, dan berkeadaban. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan sosial, politik, dan profesional, serta menjadi filter nilai di era globalisasi. Pancasila menuntun masyarakat agar tetap berpegang pada nilai kemanusiaan dan gotong royong di tengah tantangan modern seperti sekularisme dan hedonisme. Oleh karena itu, penguatan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan publik, dan budaya digital sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas, nasionalis, dan berkepribadian Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan akademik serta fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

REFERENSI | REFERENCE

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habitus nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29.
<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Amalia, F., & Najicha, F. U. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 1-6.

- Annabilah, F. (2024). Implementasi nilai praksis Pancasila pada kehidupan sehari-hari. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 1130-1136.
- Anugrah, & Rahmat. (2024). Pendidikan karakter dalam perspektif kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.53299/jppiv4i1.403>
- Ashfiya, A., Hidayat, R., & Nur, D. (2021). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Bhineka Humanika*, 3(2), 45–55. <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/113>
- Ashifa, R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Di Era Globalisasi. *Academy of Education Journal*, 12(2), 215-226.
- Atqiyah, A. N., Nasoha, A. M. M., Cahya Puranita, R., Lutfiyah, I., & Apriliyani, S. (2024). Pancasila sebagai Sistem Etika: Analisis Nilai-Nilai Fundamental dan Implementasinya di Indonesia. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 218–229.
- Bovandra, M., & Riewanto, A. (2024). Pengarusutamaan Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis riset dan inovasi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 105–118. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.445>
- Budiman, I. F. (2024). Peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(3), 47–54.
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).
- Dewi, R. S. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 177–183.
- Essla, B. C. P., Musyaffa, D. L., & Putri, N. D. (2023). Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 407-413.
- Faiz, A., & Kurniawaty, E. (2022). Pendidikan karakter di era digital dalam membentuk moral generasi muda. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 145–156.
- Falah, M. F. (2023). Corruption and human rights in the dimension of Pancasila values. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i2.65169>
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2020). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 43–51. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>
- Hadiprabowo, M. A., Wasino, & Kurniawan, E. (2023). Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology

- and Law. Journal of Law and Legal Reform, 5(4).
<https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18922>
- Hakim, A. L. (2022). *Eksistensi Pancasila sebagai simbol pemersatu multikultural bangsa. Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1). <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1353>
- Handitya, B. (2021). Membangun karakter pancasila dalam menghadapi era society 5.0. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 45-58.
- Harahap, A. M., Dewi, A. T., & Saragi, S. (2023). Urgensi Pancasila dalam Pembaharuan Hukum pada Era Digitalisasi di Indonesia. *Universitas Dharmawangsa Journal*, 17(1), 126–133.
- Hunaina, N., Calillah, M. D., & Suyono, S. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral di era milenial mahasiswa farmasi Universitas PGRI Adi Buana. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 38–49. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.308>
- Ikromah, S., Jamaludin, U., & Damanhuri. (2023). Internalisasi profil pelajar Pancasila pada dimensi gotong royong melalui pembelajaran pendidikan Pancasila sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(4). <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i4.4382>
- Inthaly, A., & Almubaroq, H. Z. (2022). Nilai praksis pancasila sebagai modal pengembangan sumber daya manusia era society 4.0 dalam rangka mendukung pertahanan negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 76.
- Iriyanto Widisuseno. (2014). Azas filosofis Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. *Humanika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 101–112. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/8858>
- Kamaria Ulpah, K., & Rahmadani, S. (2023). Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Hukum dan Sosial Sultan Adam*, 5(1), 33–41. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/1125>
- Khoiriah, K., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2023). *Implementasi pendidikan karakter religius dan toleransi melalui budaya sekolah di SMP Negeri 22 Mataram*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1448–1455. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1490>
- Lintang, F., & Najicha, U. (2023). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1). <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>
- Luthfiah, & Lhobir, A. (2023). Ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3249–3254. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6150>
- Maulida, A. S., Chanina, I., Darmawan, R., & Jannah, M. S. (2025). Pancasila sebagai pendidikan moral bangsa: Peran dan tantangan dalam mewujudkan karakter bangsa Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 155–158. <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>

- Mawaddah, I. (2023). Sistem filsafat Pancasila dalam perspektif budaya pascamodern. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 6(1), 59–67. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/1030>
- Naibaho, D. M. (2025). Pancasila Sebagai Filter Sosial Di Era Digital. *Journal Of Social, Justice And PolicY*, 4(4), 6-11.
- Nuraini, A., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2025). Peran Pancasila Sebagai Filter dari Pengaruh Negatif Globalisasi. *DIKKESH: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kesehatan*, 1(1), 1-8.
- Nurassyifa, N., & Dewi, R. (2022). Sistem etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 1220–1229. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4200>
- Permatasari, O. S. D., Hanita, M., & Purwanto, H. (2023). Strategi internalisasi nilai Pancasila pada generasi milenial. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 6(2), 101–118. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.46659>
- Pernando, O. R., Amelia, I., Putri, N. A., Putri, N. A., Karlina, A., & Hudi, I. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Etika dan Pancasila untuk Mewujudkan Kehidupan Anti Korupsi di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.78>
- Priwardani, A. N., Monica, A. A. D., & Yaasiin, M. N. F. (2023). Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Indigenous*, 2(3), 226-232. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79642/pdf>
- Putri Hafidza, S., Aqilah Nur Rachman, Y., Izzuddin Al Fatih, M., Hafidah Alqanit, Y., & Syahrul Putra, R. (2023). Masih Sulitnya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik. *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 14(1), 01–05. Retrieved from <https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/187>
- Rahmawati, A. D. (2025). Pancasila dalam Pandangan Generasi Z: Esensi dan Implementasi Nilai-Nilai Dasar Negara di Era Digital. *Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan*, 1(2), 74-83.
- Ramdhani, S. W. (2018). Analisis linguistik Pancasila berdasarkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. *Jurnal Ilmiah Humaniora*, 10(3), 55–66.
- Ruyadi, Y., Hadiano, D., Nugraha, D. M., Nurhayati, W., & Dahliyana, A. (2021). Challenges and strengthening the role of Pancasila ideology in the reform era through increasing literacy. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.63991>
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa (Pentingnya rumusan butir-butir Pancasila sebagai dasar pendidikan moral dan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Journal of Education*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.51772/tarbawi.v2i1.93>

- Setiyawan, W. B. M., Zaelani, M. A., & Dona, F. (2022). Pancasila sebagai refleksi karakter bangsa dan aktualisasinya dalam menghadapi fenomena hoax. *Jurnal Supremasi*, 17(2), 101–110. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1983>
- Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.
- Simamora, S. (2022). Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Etika Profesi di Lingkungan Akademik. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(1), 34-46. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/355/279/>
- Supramudyo, G. T., Irianto, J., Setijaningrum, E., & Bahar, A. A. (2024). The role of Pancasila ideology in legitimizing public policies during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 1-10. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.1-10>
- Syajaro, T., Wulandari, V., Amelia, S., Murniati, Y., Arifin, K., & Trisno, B. (2024). Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 829–835.
- Tsaqifahukama, S., Raharjo, A., & Lestari, D. (2023). Pancasila sebagai sistem filsafat: Landasan, karakteristik, dan tantangannya di era modern. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 15–27. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1315>
- Windari, S., & Aziz, R. (2022). Filsafat dalam sistem nilai Pancasila. *Aksiologi: Jurnal Filsafat dan Humaniora*, 4(1), 1–10. <https://aksiologi.pubmedia.id/index.php/aksiologi/article/view/64>
- Yohamintin, & Widiensyah, A. (2024). Urgensi Pancasila dalam Pendidikan Dasar di Masa Sekarang dan Masa Depan. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 6(1), 31–40.
- Zahro, A. H., Ardy, C. A. C., Athoillah, D. A., Astutik, W. P., & Ula, Y. R. (2024). Tantangan dan Peluang Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 64-69.
- Zhafira, A., Suhertina, R., Jengka, R. A., & Kalara, K. (2024). Pancasila sebagai sumber inspirasi pemikiran bangsa: Refleksi dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Cahaya Publikasi*, 1(1), 1–10. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/cp/article/download/4/4/11>